PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL DENGAN MODUS PENIPUAN

Ridwan Maulana Muhammad¹, Siti Marwiyah², Renda Aranggraeni³, Vallencia Nandya Paramitha⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email : ridwankhamil023@gmail.com

ABSTRACT

The level of information technology development has encouraged an increase in digital trade transactions through e-commerce platforms, one of which is Shopee. This phenomenon provides convenience for consumers, but it also raises serious issues in the form of criminal fraud and illegal trade that harm society. The urgency of this research lies in the increasing number of digital fraud cases that test the effectiveness of legal regulations, particularly the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transaction Law. This study aims to answer questions about the forms of criminal acts in digital transactions through Shopee and how legal protection is provided to consumers based on Indonesian positive law. This study uses a normative legal research design with a qualitative approach. Data was collected through a literature study, covering primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials from academic literature. Two Supreme Court decisions, namely Decision Number 109 K/Pid.Sus/2024 and Number 951 K/Pid.Sus/2020, were used as case studies to assess the application of law in digital consumer protection. The analysis was conducted descriptively and analytically by interpreting legal norms and relating them to the context of practice. The results of the study show that digital transactions are prone to being exploited for criminal acts of subsidised price fraud and the distribution of prohibited goods. Legal protection through the UUPK and UU ITE still faces obstacles, particularly in terms of digital evidence, low consumer legal literacy, and limited online dispute resolution mechanisms. This study contributes to expanding the study of consumer protection law by integrating the perspectives of criminal law, cyber law, and jurisprudence. The conclusion of this study emphasises the need for regulatory updates, increased digital literacy, and strengthened obligations for e-commerce platforms to protect consumers. Further research is recommended to examine the effectiveness of electronic dispute resolution and the role of non-litigation institutions in digital consumer protection.

Keywords : Consumer Protection; Digital Fraud; Shopee; ITE Law; E-Commerce.

ABSTRAK

Tingkat Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi perdagangan digital melalui platform *e-commerce*, salah satunya Shopee. Fenomena ini menghadirkan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga memunculkan persoalan serius berupa tindak pidana penipuan dan perdagangan ilegal yang merugikan masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus penipuan digital yang menguji efektivitas regulasi hukum, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk tindak pidana dalam transaksi digital melalui Shopee serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik. Dua putusan Mahkamah Agung, yakni Putusan Nomor 109 K/Pid.Sus/2024 dan Nomor 951 K/Pid.Sus/2020, dijadikan studi kasus untuk menilai penerapan hukum dalam perlindungan konsumen digital. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan konteks praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi digital rawan

dimanfaatkan untuk tindak pidana penipuan harga barang bersubsidi maupun peredaran barang terlarang. Perlindungan hukum melalui UUPK dan UU ITE masih menghadapi kendala, terutama pada aspek pembuktian digital, rendahnya literasi hukum konsumen, dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa daring. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum perlindungan konsumen dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hukum siber, dan yurisprudensi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital, serta penguatan kewajiban platform *e-commerce* dalam melindungi konsumen. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah efektivitas penyelesaian sengketa berbasis elektronik dan peran lembaga nonlitigasi dalam perlindungan konsumen digital.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Penipuan Digital; Shopee; UU ITE; *E-Commerce*.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan terhadap pola hidup masyarakat modern. Perubahan ini berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga sistem hukum yang berlaku. Pemanfaatan sarana teknologi informasi tidak hanya menghasilkan manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai penyimpangan yang merugikan banyak pihak, seperti carding, hacking, penipuan, hingga perjudian daring (M. F. Nasution et al., 2025). Kondisi tersebut menegaskan bahwa teknologi digital selain menghadirkan peluang, juga menimbulkan risiko yang kompleks dalam ranah hukum.

Kemajuan teknologi informasi semakin nyata dengan penggunaan media elektronik seperti telepon pintar dan komputer canggih yang mendukung aktivitas manusia sehari-hari. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dalam cakupan global. Perkembangan tersebut membuka ruang bagi transaksi barang dan/atau jasa lintas batas negara melalui *e-commerce*. Menurut WTO, *e-commerce* meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, hingga pengiriman barang dan jasa secara elektronik. Akademisi juga memandang *e-commerce* sebagai hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli yang berlangsung tanpa pertemuan fisik (Kristiyanti, 2022).

E-commerce pada dasarnya adalah disiplin multidimensi yang melibatkan aspek teknik, bisnis, dan hukum. Dari sisi bisnis, transaksi digital mempermudah proses pemasaran, pembelian, serta pembayaran. Dari sisi hukum, *e-commerce* menimbulkan persoalan baru terkait privasi informasi, hak kekayaan intelektual, perpajakan, hingga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, *e-commerce* tidak dapat dipandang sekadar sebagai aktivitas perdagangan

modern, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang menuntut regulasi adaptif untuk mengantisipasi kejahatan yang menyertainya (Khatimah, 2023).

Alasan utama konsumen memilih berbelanja secara online adalah efisiensi waktu dan biaya. Melalui platform digital, konsumen dapat memilih dan membandingkan produk tanpa harus hadir secara langsung di toko fisik. Pola konsumsi ini dinilai lebih praktis, ekonomis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Klaudia BR Semimbing, 2021). Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman serius berupa tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga membuka celah penyalahgunaan hukum.

Seiring meningkatnya penetrasi internet, kejahatan dunia maya atau *cyber crime* berkembang pesat. *Cyber crime* bukanlah tindak pidana sederhana karena pelaku menggunakan sarana digital yang sulit dilacak secara konvensional. Kategori kejahatan ini meliputi hacking, cyberporn, hingga penipuan daring dengan memanfaatkan sistem elektronik. Tindak pidana tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang dibentuk oleh teknologi informasi (Kristiyanti, 2022).

Dalam konteks Indonesia, penipuan dalam transaksi *e-commerce* kerap terjadi dengan berbagai modus, seperti mengirimkan produk yang tidak sesuai deskripsi atau bahkan tidak mengirimkan barang sama sekali. Modus lain dilakukan dengan menyalahgunakan fitur platform digital untuk menipu konsumen. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial dan psikologis bagi konsumen, sekaligus menguji efektivitas perangkat hukum nasional dalam memberikan perlindungan (Kristiyanti, 2022).

Ironisnya, banyak korban penipuan enggan melaporkan kasus ke pihak berwenang. Faktor penyebabnya antara lain ketidaktahuan mengenai regulasi, kerumitan proses hukum, serta kesulitan melacak identitas pelaku. Pelaku sering menggunakan rekening pinjaman, alamat fiktif, dan nomor telepon sementara, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum (Zuleika et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya posisi konsumen dalam struktur hubungan hukum digital, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan hukum yang nyata.

Selain itu, transaksi daring menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku yang memuat klausula berat sebelah, sehingga konsumen berada pada posisi lemah. Situasi ini bertentangan dengan Pasal 4 UUPK yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan adil (Klaudia BR Semimbing, 2021). Oleh sebab itu, perlindungan hukum dalam transaksi digital menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Jaminan kepastian hukum merupakan elemen penting dalam perlindungan konsumen digital. Kepastian hukum tidak hanya memberi rasa aman bagi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha agar menjalankan kegiatan perdagangan secara jujur dan bertanggung jawab. Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui pengakuan hak-haknya serta pengawasan terhadap pelaku usaha (Zuleika et al., 2024). Namun, implementasi prinsip ini sering kali terkendala dalam praktik, khususnya di ruang digital.

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti persoalan perlindungan konsumen dalam *e-commerce*, tetapi masih terbatas pada analisis normatif tanpa melihat efektivitas penerapan hukum. Sebagai contoh, penelitian Nabawi (2023) menekankan upaya hukum melalui gugatan perdata atau BPSK, sedangkan Wydhea (2022) menyoroti perlindungan pelaku usaha dari tindak pidana konsumen. Namun, kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam mekanisme perlindungan konsumen dalam kasus penipuan digital berbasis platform, khususnya Shopee, dengan menggunakan studi putusan pengadilan sebagai analisis utama.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap konsumen korban penipuan dalam transaksi digital melalui platform Shopee. Penelitian ini menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pid.Sus/2024 dan Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2020 sebagai dasar studi kasus. Kajian ini menekankan bagaimana UUPK dan UU ITE diterapkan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya angka penipuan online yang berdampak luas pada masyarakat. Secara ilmiah, penelitian ini menambah pemahaman mengenai efektivitas hukum perlindungan konsumen di era digital. Secara praktis, penelitian ini memberi panduan bagi konsumen dalam mengambil langkah hukum, serta rekomendasi bagi penyelenggara platform agar meningkatkan mekanisme perlindungan pengguna. Dengan demikian, topik ini memiliki relevansi ganda, baik teoritis maupun praktis, dalam pengembangan hukum siber di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk tindak pidana perdagangan dalam transaksi digital melalui Shopee serta mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini tidak hanya memotret kondisi regulasi, tetapi juga menilai efektivitas penerapan hukum melalui studi kasus yang aktual. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian analisis mendalam yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hukum perlindungan konsumen, dan hukum siber. Artikel ini diharapkan memperkaya literatur hukum Indonesia mengenai perlindungan konsumen digital, sekaligus memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan *e-commerce*. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi hukum dalam memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menelaah norma hukum positif dan mengkaji efektivitas penerapannya dalam perlindungan konsumen terhadap penipuan digital. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang relevan, sehingga tidak bertumpu pada data statistik melainkan pada argumentasi hukum yang bersifat yuridis.

Jenis penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti mengamati konsistensi norma dalam peraturan, sekaligus menilai implementasinya dalam praktik melalui studi kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pendekatan studi kasus (*case study approach*) diterapkan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pid.Sus/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pid.Sus/2020 yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat langsung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah terdahulu yang relevan (Alfiansyah, 2023; Zulfiqar, 2024). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan portal berita resmi digunakan untuk memperjelas istilah serta memperkuat konteks penelitian.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum terkait perlindungan konsumen dan tindak pidana siber. Dokumen hukum diperoleh dari sumber resmi, seperti situs Mahkamah Agung, Kominfo, BPKN, serta repositori akademik. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui sistematisasi, interpretasi, dan konstruksi hukum. Tahap sistematisasi bertujuan mengelompokkan ketentuan hukum sesuai tema perlindungan konsumen digital. Interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna pasal-pasal terkait, baik melalui metode gramatikal maupun teleologis. Selanjutnya, konstruksi hukum diterapkan untuk menarik hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum dalam kasus yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni menguraikan norma hukum yang berlaku dan menilai kesesuaiannya dengan realitas praktik di lapangan. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana ketentuan UUPK dan UU ITE

diterapkan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen korban penipuan digital di platform Shopee, dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai bukti yuridis yang konkret. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital melalui Platform Shopee Terhadap Putusan MA No. 109 K/Pid.Sus/2024 dan Putusan MA No. 951 K/Pid.Sus/2020.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa transaksi digital melalui platform Shopee menghadirkan permasalahan kompleks terkait perlindungan konsumen. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pid.Sus/2024 dan Nomor 951 K/Pid.Sus/2020 menunjukkan adanya berbagai bentuk tindak pidana perdagangan, mulai dari penipuan harga barang subsidi hingga penggunaan marketplace sebagai sarana peredaran barang terlarang. Kedua kasus ini menegaskan bahwa *e-commerce* dapat menjadi medium strategis sekaligus rawan bagi tindak pidana digital yang berdampak langsung pada hak-hak konsumen.

Temuan pertama memperlihatkan mekanisme pembayaran digital yang berpotensi memunculkan kerentanan kebocoran data konsumen. Proses transfer melalui rekening bank, kartu kredit, atau dompet digital menghadirkan risiko penyalahgunaan data pribadi yang seringkali dimanfaatkan untuk modus penipuan (Nu'man, 2023). Hal ini sejalan dengan teori keamanan siber yang menekankan bahwa setiap lapisan transaksi elektronik membuka peluang serangan digital jika tidak dilindungi dengan sistem enkripsi yang memadai. Konteks ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya sebatas pada aspek barang, tetapi juga mencakup aspek informasi pribadi.

Hasil analisis selanjutnya mengindikasikan kelemahan klausula baku dalam transaksi *e-commerce*. Banyak pelaku usaha hanya mencantumkan informasi terbatas pada halaman "syarat dan ketentuan" tanpa memuat perlindungan konsumen secara komprehensif. Kondisi ini melanggar Pasal 18 UUPK yang melarang klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha (Konsumen et al., 2020). Studi sebelumnya oleh Kristiyanti (2022) juga menegaskan

bahwa dominasi perjanjian baku menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan konsumen. Fenomena ini memperlihatkan bahwa regulasi normatif belum cukup mengikat perilaku pelaku usaha digital.

Analisis terhadap kasus pupuk subsidi menunjukkan adanya penipuan harga dengan menjual pupuk urea bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik tersebut melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 10 huruf a UUPK yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan barang sesuai ketentuan harga resmi (I. R. Nasution et al., 2024). Konsumen dalam kasus ini adalah petani kecil dengan posisi tawar rendah, sehingga mereka terjebak pada ketergantungan pasar. Hal ini menggambarkan bahwa tindak pidana perdagangan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memperparah ketidakadilan struktural dalam sistem distribusi barang subsidi.

Kasus lain pada Putusan MA Nomor 951 K/Pid.Sus/2020 menunjukkan pemanfaatan Shopee sebagai kedok untuk memperdagangkan narkotika. Temuan ini sangat penting karena menegaskan bahwa marketplace tidak hanya dimanfaatkan untuk penipuan barang konsumsi biasa, tetapi juga kejahatan berat yang diatur dalam UU Narkotika. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan sistem perdagangan online untuk kejahatan transnasional. Oeliga et al. (2022) menekankan bahwa fenomena ini membuktikan lemahnya sistem verifikasi penjual dan lemahnya peran platform dalam menyaring barang ilegal.

Data yang diperoleh dari studi kasus memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi barang bersubsidi dan barang terlarang. Aparat penegak hukum di daerah menghadapi keterbatasan sumber daya, sehingga sulit membuktikan unsur kesengajaan penipuan harga maupun melacak pelaku penipuan digital (Zuleika et al., 2024). Kondisi ini memperkuat argumen Satjipto Rahardjo bahwa hukum tanpa kekuatan implementasi hanya menjadi "teks normatif" tanpa daya guna bagi masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dalam penegakan hukum digital.

Analisis hukum pidana menunjukkan bahwa penipuan digital dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar. Namun, praktik pembuktian digital crime tidak mudah karena

mebutuhkan bukti elektronik yang sah, seperti rekam jejak transaksi, alamat IP, dan dokumen digital lainnya (Mazhr, 2024). Hiariej (2018) menegaskan bahwa hukum pidana harus beradaptasi dengan realitas teknologi informasi agar mampu menjawab tantangan pembuktian. Temuan ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan kemampuan teknis aparat dalam mengimplementasikannya.

Perlindungan hukum konsumen dalam perspektif UUPK memberikan jaminan atas hak konsumen terhadap informasi yang benar, keamanan transaksi, dan ganti rugi apabila dirugikan. Namun, dalam praktiknya konsumen sering kali tidak mengetahui mekanisme pengaduan atau enggan menempuh jalur hukum karena rumitnya prosedur (Kristiyanti, 2022). Studi Zulfiqar (2024) juga menyoroti rendahnya literasi hukum konsumen sebagai hambatan utama efektivitas perlindungan konsumen digital. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan literasi hukum dan akses keadilan yang mudah.

Platform Shopee sebenarnya telah menyediakan fitur pengembalian dana dan pusat resolusi, tetapi mekanisme ini sering dipandang tidak efektif karena respons yang lambat dan tidak semua kasus ditindaklanjuti serius (Oeliga et al., 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab penyelenggara platform masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen. Menurut teori tanggung jawab pelaku usaha, penyelenggara *e-commerce* seharusnya memikul tanggung jawab preventif maupun represif dalam menjaga keadilan transaksi. Temuan ini menekankan perlunya penguatan kewajiban hukum bagi platform digital.

Secara konseptual, perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum pidana, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif (Soekanto, 2007). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fungsi preventif melalui regulasi belum efektif karena lemahnya edukasi masyarakat, sementara fungsi represif menghadapi kendala teknis dalam pembuktian digital. Fungsi rehabilitatif hampir tidak tampak dalam konteks konsumen digital, mengingat fokus hukum lebih pada menghukum pelaku dibanding memulihkan kerugian korban. Hal ini menegaskan perlunya redefinisi peran hukum dalam dunia digital.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontradiksi antara prinsip kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen semakin tajam dalam transaksi digital. Kontrak baku yang ditetapkan pelaku usaha melemahkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontrak. Menurut teori kontrak sosial Rousseau, kesetaraan adalah syarat mutlak keadilan hukum. Dalam konteks *e-commerce*, tanpa intervensi regulasi, kebebasan berkontrak justru melahirkan eksploitasi konsumen. Oleh karena itu, regulasi perlindungan konsumen berperan sebagai instrumen korektif terhadap ketidakseimbangan pasar digital.

Pembahasan ini mengonfirmasi hasil studi Kristiyanti (2022) yang menyatakan bahwa konsumen berada pada posisi tawar lemah dalam transaksi digital. Namun, penelitian ini memperluas cakupan dengan mengaitkan kondisi tersebut pada kasus konkret dalam putusan pengadilan. Hal ini menjadi kontribusi penting karena memperlihatkan bahwa kesenjangan teoretis benar-benar terejawantah dalam praktik yuridis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris melalui analisis yurisprudensi.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya integrasi hukum perlindungan konsumen dengan hukum siber sebagai kerangka hukum baru. Perlindungan konsumen digital tidak cukup diatur dalam UUPK yang berbasis transaksi konvensional, melainkan harus diperkuat melalui pengaturan khusus yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi praktisnya adalah perlunya mekanisme penyelesaian sengketa digital yang lebih sederhana, cepat, dan berbasis elektronik agar konsumen tidak enggan memperjuangkan haknya.

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital menjadi faktor kunci perlindungan konsumen. Masyarakat yang rendah pemahaman hukum lebih mudah menjadi korban penipuan daring (Zuleika et al., 2024). Oleh karena itu, edukasi hukum dan teknologi harus berjalan beriringan dengan pembaruan regulasi. Kominfo dan BPKN berperan penting dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat, sementara platform digital wajib meningkatkan transparansi dan keamanan sistem. Temuan ini menegaskan perlunya kolaborasi multipihak dalam membangun ekosistem *e-commerce* yang adil dan aman.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai bentuk tindak pidana dalam transaksi digital serta mekanisme perlindungan konsumen yang

tersedia menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini memperkaya teori hukum perlindungan konsumen dengan menunjukkan bagaimana UUPK dan UU ITE diterapkan dalam kasus konkret. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, dan peran aktif platform digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan langkah strategis perlindungan konsumen di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi digital melalui platform Shopee membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan dan penipuan dengan berbagai modus, baik dalam bentuk penipuan harga barang bersubsidi maupun penyalahgunaan marketplace untuk memperdagangkan barang terlarang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pid.Sus/2024 dan Nomor 951 K/Pid.Sus/2020 menegaskan bahwa kejahatan digital telah menimbulkan kerugian signifikan bagi konsumen serta menantang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Implikasi temuan ini memperkuat teori hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen yang menekankan fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam praktik, perlindungan hukum masih menghadapi hambatan serius berupa lemahnya literasi hukum masyarakat, terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa digital, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam pembuktian kejahatan berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum positif belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan perlindungan konsumen di era digital.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah memperluas wacana hukum perlindungan konsumen dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hukum siber, dan analisis yurisprudensi. Penelitian ini tidak hanya menekankan pentingnya pembaruan regulasi, tetapi juga mengajukan rekomendasi strategis berupa peningkatan literasi hukum konsumen, penguatan kewajiban platform digital, dan pengembangan sistem penyelesaian sengketa

berbasis elektronik. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur hukum Indonesia sekaligus memberi landasan praktis bagi pembuat kebijakan.

Area yang masih perlu dieksplorasi dalam penelitian selanjutnya mencakup efektivitas mekanisme perlindungan konsumen digital yang dilakukan langsung oleh platform *e-commerce*, peran lembaga nonlitigasi seperti BPSK dalam penyelesaian sengketa daring, serta pengaturan perlindungan data pribadi sebagai aspek integral dari keadilan konsumen. Penelitian lanjutan juga perlu menelaah keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Responsif.
- Fuady, M. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Khairandy, R. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khatimah. (2023). E-Commerce dan Tantangan Regulasi Hukum Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 101–118.
- Klaudia, B. R. S. (2021). Perlindungan hak konsumen dalam transaksi online: Analisis UUPK. *Jurnal Hukum Bisnis dan Konsumen*, 12(1), 45–63.
- Kominfo. (2024). Penanganan Penipuan Digital di Indonesia. Retrieved from <https://kominfo.go.id>
- Konsumen, Y., et al. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 951 K/Pid.Sus/2020. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 109 K/Pid.Sus/2024. Jakarta: MA RI.
- Mazhr. (2024). Penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 6(1), 77–93.
- Nasution, I. R., et al. (2024). Distribusi barang subsidi dan perlindungan konsumen. *Jurnal Sosio-Legal*, 10(2), 88–106.

- Nasution, M. F., et al. (2025). Hukum Pidana dan Teknologi Informasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nu'man. (2023). Kebocoran data pribadi dalam transaksi digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 7(1), 23–41.
- Oeliga, A., et al. (2022). Tindak pidana penipuan digital: Studi kasus marketplace. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 4(2), 112–130.
- Ramli, A. M. (2011). *Cyberlaw Indonesia: Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuleika, R., et al. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi online: Perspektif UU ITE dan UUPK. *Jurnal Ilmiah Hukum & Teknologi*, 6(1), 55–74.